

PENGANTAR REDAKSI

Isu kebijakan masih mewarnai beberapa artikel dalam Populasi edisi ini. Dalam rangka menuju pemerintahan yang desentralistis dan demokratis, sudah saatnya rakyat berpartisipasi dalam proses perumusan dan menjadi penentu kebijakan. Artikel Purwo Santoso membahas tentang hal ini. Mekanisme perumusan kebijakan partisipatif dari bawah (*bottom-up*) di masa pemerintahan Orde Baru masih sebatas urusan administratif dan bukan sebagai proses pengelolaan hak-hak politik warga negara dalam formulasi kebijakan. Di era otonomi daerah ini diharapkan semakin terbuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi dan aspirasi khususnya dalam perumusan kebijakan.

Masih tentang kebijakan, pada tulisan berikutnya, Ana Nadhya Abrar lebih spesifik mengulas tentang kebijakan komunikasi, yaitu UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang belum dapat sepenuhnya merespons masalah media penyiaran di Indonesia. Undang-undang yang sedianya dibuat untuk menertibkan media penyiaran, justru menghambat kebebasan media penyiaran dalam menyiarkan berita. Dengan kata lain, pemerintah belum dapat menentukan arah formulasi kebijakan komunikasi yang ideal dan kondusif untuk membangun demokrasi yang sehat di Indonesia.

Tulisan Muyanja Ssenyonga membahas peranan program kredit pertanian di Indonesia. Tidak terlepas dari dampak positif program kredit dalam meningkatkan dan memberdayakan petani, ternyata program ini masih dibayangi permasalahan tunggakan kredit dan distorsi pasar kredit yang berakibat lambatnya kemajuan sektor finansial di Indonesia. Selain itu masih banyak terdapat kelemahan dalam program ini, antara lain adalah dalam perencanaan, penyebaran informasi, penyaluran, sistem pengawasan, dan penagihan.

Sebagai penutup, diketengahkan tulisan yang mendiskusikan konsep kemitrasejajaran dari sudut pandang ilmu filsafat. Masalah pelanggaran terhadap hak kaum perempuan hingga saat ini masih menjadi isu yang belum menemui jalan pemecahan meskipun berbagai pendekatan keilmuan berusaha mengkaji permasalahan ini. Septiana Dwiputri Maharani menjabarkan permasalahan ini dari sudut pandang filsafat. Filsafat sebagai ilmu yang mempelajari hidup dan kehidupan manusia diharapkan dapat menyumbangkan pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi kaum perempuan ini. Namun kenyataannya justru ilmu filsafat tersebut terbentuk oleh paradigma patriarkat yang senantiasa memosisikan perempuan pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.